

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB iii	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	11
Beban	12
Aset	15
Kewajiban	19
Ekuitas Dana	19
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	20
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	21
BAB V	23
PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Parakan Kauman sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Kelurahan Parakan Kauman dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan telah melakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023. Kelurahan Parakan Kauman telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir sebagai berikut:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

KODE	REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURAN	%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	5	BELANJA DAERAH	491.879.400	491.879.400	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	51	BELANJA OPERASI	486.879.400	486.879.400	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	52	BELANJA MODAL	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.210.000	136.210.000	-2.000.000	-1,447%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.000.000	29.000.000	-2.000.000	-6,451%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	66,67%

7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.01- 5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	66,67%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	7.500.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.04- 5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.05- 5102	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	6.500.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.08- 5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	-0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.06.09- 5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.800.000	86.800.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.01- 5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	0%

7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.02- 5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.800.000	69.800.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.08.04- 5102	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000	69.800.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.02- 5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.910.000	7.910.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.09- 5102	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000	7.910.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	0	0%

7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.09.06- 5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	5.000.000	+2.000.000	+66,67
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.01. 2.07.06- 5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	5.000.000	+2.000.000	+66,67
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	355.669.400	355.669.400	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	355.669.400	355.669.400	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.000.000	80.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.03. 2.02.02- 5102	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	275.669.400	275.669.400	0	0%
7.01.0.00.0.0 0.05.0001-	7.01.03. 2.02.03- 5102	Belanja Barang dan Jasa	275.669.400	275.669.400	0	0%

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan 4. Lain-lain PAD yang sah	0 4.000.000 0 0	0 16.100.000 0 0	 357,77
	JUMLAH PENDAPATAN	4.000.000	16.100.000	357,77

Dari tabel diatas secara keseluruhan realisasi pendapatan melebihi target pendapatan.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN****TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	BELANJA OPERASI	Rp 486.879.400	Rp 478.580.864	98,29
1.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 486.879.400	Rp 478.580.864	98,29
	BELANJA MODAL	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100
1.	BELANJA MODAL DAN PERALATAN MESIN	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100
	JUMLAH BELANJA	Rp 491.879.400	Rp 483.580.864	98,31

Dalam pelaksanaan APBD 2023 realisasi belanja Kelurahan Parakan Kauman mencapai 98,31 % atau Rp 483.580.864, dari Anggaran yang disediakan/ yang ditetapkan sebesar Rp 491.879.400, yang terperinci belanja Barang dan Jasa tercapai 98,29% atau Rp 478.580.864, dari anggaran yang disediakan Rp 486.879.400. Sedangkan belanja modal tercapai 100 % atau Rp 5.000.000, dari anggaran yang disediakan Rp 5.000.000.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan adalah waktu pengajuan pencairan anggaran, karena saling terkait dengan skpd lain.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan daerah mencapai Rp 16.100.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Belanja Barang dan Jasa	Rp 486.879.400	Rp 478.580.864
Belanja Modal	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Jumlah	Rp 491.879.400	Rp 483.580.864

a. Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 478.580.864, atau 98,30 % dari anggaran sebesar Rp 486.879.400.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.000.000, Atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 5.000.000.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan daerah mencapai Rp 16.100.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.

3.1.4. Beban

8	BEBAN DAERAH	472.483.978
81	BEBAN OPERASI	472.483.978
8102	Beban Barang dan Jasa	472.483.978
810201	Beban Barang	94.446.687
81020101	Beban Barang Pakai Habis	94.446.687
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	60.011.900
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.699.987
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	599.300
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	625.000
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.719.400
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	800.000
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.211.250
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.352.850

810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.977.000
810202	Beban Jasa	369.911.531
81020201	Beban Jasa Kantor	366.683.652
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.180.000
810202010007	Beban Honorarium Rohaniwan	19.200.000
810202010013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.200.000
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.000
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	212.850.000
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	16.500.000
810202010059	Beban Tagihan Telepon	3.879.150
810202010060	Beban Tagihan Air	832.950
810202010061	Beban Tagihan Listrik	4.119.052
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	549.500
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.227.879

810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.833.727
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	175.176
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	218.976
810203	Beban Pemeliharaan	3.200.000
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	700.000
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.00
810203020409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000
810204	Beban Perjalanan Dinas	4.925.760
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.925.760
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.955.760
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.970.000
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	68.535.517,75
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.552.377,15
81080101	Beban Penyusutan Alat Besar	2.142.857,15

81080104	Beban Penyusutan Alat Pertanian	150.000,00
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.442.020,00
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	130.000,00
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	740.000,00
81080110	Beban Penyusutan Komputer	1.947.500,00
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.983.140,60
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	55.983.140,60

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara Kas Tahun Anggaran
2023

Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank Rp 0

b. Kas di Bendahara Rp 0
Pengeluaran

Disetor ke kas Daerah Rp 0

Jumlah Kas dan Setara **Rp 0**
Kas

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dana yang masih berada di bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp 0

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Parakan Kauman per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,

c. Disetor ke Kas Daerah

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 disetor ke Kas Daerah Rp 0.

2. Piutang

Per 31 Desember 2023

a. Saldo Piutang lain-lain

Tahun Anggaran 2023

Piutang Sewa Balai Kelurahan Rp 0

Jumlah piutang lain-lain **Rp 0**

3. Persediaan

Per 31 Desember 2023

Tahun Anggaran 2023

a. Alat Tulis Kantor	Rp 35.000
b. Kertas dan Cover	Rp 520.000
c. Benda Pos	Rp 300.000
d. Bahan Komputer	Rp 403.750
e. Perabot Kantor	<u>Rp 88.000</u>
Jumlah Persediaan	Rp 1.346.750

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Aset Tetap :

a. Tanah	Rp 12.730.099.184
b. Peralatan dan Mesin	Rp 279.155.598
c. Gedung dan Bangunan	Rp 2.799.157.030
d. Asset Tetap Lainnya	Rp 10.016.500

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15.818.428.312 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dan aset Tahun Anggaran 2023 (Neraca Awal).

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Aset Tetap Tanah sebesar Rp 12.730.099.184, terjadi mutasi antar opd dari kelurahan parakan kauman ke DPRKPLH sebesar Rp 81.348.059 dari nilai awal Rp 12.811.447.243,00 menjadi Rp 12.730.099.184.

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 274.155.598 terdiri dari:

Alat Besar	Rp 15.000.000
Alat Angkutan	Rp 34.832.000
Alat pertanian	Rp 600.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 129.410.598
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 6.300.000
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 10.302.000

Komputer

Rp 82.711.000

terjadi penambahan nilai asset peralatan dan mesin sebesar Rp 5.000.000 atas pembelian belanja modal personal computer.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 2.799.157.030.

d. Aset Tetap Lainnya Rp 10.016.500

Aset Tetap Lainnya berupa Gorden, Buku perpustakaan, Buku Geger doorstoot, Kursi dan Flashdisk.

3.1.6. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2023 di Kelurahan Parakan Kauman ada kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang sebesar Rp 6.093.342 yang terdiri dari utang belanja jasa tenaga administrasi Rp 3.750.000, utang belanja jasa tenaga keamanan Rp 1.500.000 sebesar dan utang belanja jasa kantor Telephon Rp 352.650, Air Rp 144.600, Listrik Rp 346.092.

3.1.7. Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Aset lancar Rp 1.346.750

Aset Lancar berupa cadangan persediaan (Kertas dan Cover, ATK, Benda Pos, Bahan Komputer dan Perabot Kantor).

2. Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Investasi permanen	Rp	0,00
Jumlah Aset Tetap	Rp	15.818.428.312
Aset lancar	Rp	1.346.750
Jumlah Aset lainnya	Rp	<u>9.160.000 +</u>
Jumlah	Rp	15.828.935.062
Akumulasi Penyusutan	Rp	706.486.305

Jumlah Asset	Rp	15.122.448.756
Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00 -
Kewajiban Jangka Pendek	Rp	<u>6.093.342</u>
Jumlah Kewajiban	Rp	6.093.342
Jumlah Ekuitas	Rp	15.116.355.414

Jadi jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 15.122.448.756

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1. Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Uraian	Anggaran	LRA	Beban LO	Utang Belanja
Pendapatan	4.000.000	16.100.000	0	0
Belanja Operasi	486.879.400	478.580.864	547.760.587,75	0
Belanja Modai	5.000.000	5.000.000	0	0
Belanja Barang dan Jasa	486.879.400	478.580.864	479.225.070,00	4.593.342

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan keuangan, Kelurahan Parakan Kauman berdomisili di Jalan Raya Saubari No. 74 (0293) 596448 Kode Pos 56254, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Penjelasan Ringkas Sifat Operasi Entitas/Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kelurahan Parakan Kauman Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020.

3. Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman adalah sebagai berikut:

Lurah	: BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Sekretaris Lurah	: BILAL ARIFIN, S.M
Bendahara	: SAFAAT SAMSUL ALAM
Staff	: KUSMARTONO
Staff	: ARIEF MAKRUF

4. Pemerintahan Desa

Di Kelurahan Parakan Kauman terdapat 16 RW dan 74 RT dengan rincian sebagai berikut:

1. RW. 001 Tejosari	9. RW. 009 Jogomertan
2. RW. 002 Sidorejo	10. RW. 010 Klewogan
3. RW. 003 Jetis Lor	11. RW. 011 Karangtengah
4. RW. 004 Jetis Kidul	12. RW. 012 Jetis Kauman
5. RW. 005 Karangsari	13. RW. 013 Coyudan Selatan
6. RW. 006 Karangsari	14. RW. 014 Coyudan Utara
7. RW. 007 Besaran	15. RW. 015 Sekrikil
8. RW. 008 Jogomertan	16. RW. 016 Situk Coyudan Utara

5. Letak Geografis

Kelurahan Parakan Kauman merupakan salah satu dari 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Parakan, beralamat di Jalan Saubari No. 74 Parakan. Pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Ringinanom dan, Utara berbatasan dengan Desa Manden, serta pada bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakan Wetan dan Selatan berbatasan dengan Desa Sanggen. Luas kelurahan Parakan Kauman adalah 108,3 ha. Secara administratif, Kelurahan Parakan Kauman terbagi menjadi 16 RW, dan 74 RT.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

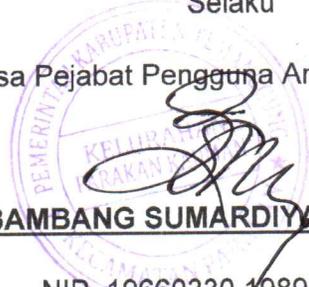
Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2024

LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku

Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran /Barang


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos

NIP. 19660330 198903 1 008

